

## Komisi III DPR Batal Rampungkan Bahas RKUHP 21-22 November

JAKARTA (IM) - Komisi III DPR ternyata batal merampungkan tahapan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada pekan depan. Sebelumnya, Komisi Hukum DPR ini menyatakan akan merampungkan pembahasan RKUHP untuk dilanjutkan pengambilan keputusan pada 21-22 November. "Rapat pembahasan RKUHP 21-22 November ditunda," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari atau Tobas kepada wartawan, Minggu (20/11).

Namun, Tobas tidak memberikan alasan pemerintah membatalkan rapat tersebut. Tobas berharap penundaan itu dalam rangka mengkaji kembali masukan-masukan yang disampaikan DPR dan masyarakat terkait draf RKUHP.

Tobas merujuk pada rapat sebelumnya, yakni masih ada sejumlah isu krusial yang harus dikaji oleh pemerintah serta DPR. Di antaranya isu hukum adat dan isu demokrasi.

"Living law yang berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Juga pasal-pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat yang harus dibatasi pengertiannya, seperti makar, penyerangan kehormatan harkat martabat presiden/wapres, penghinaan

lembaga negara, penghinaan kekuasaan umum," katanya.

Tobas menyoroti isu contempt of court terkait publikasi persidangan, pidana narkotika yang harus disesuaikan dengan rencana kebijakan narkotika baru dalam RUU Narkotika, serta pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan. Isu soal rekayasa kasus yang menjadi usulan baru dan belum dituangkan di draf juga perlu dibicarakan lagi.

Kemudian, pemenuhan asas non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur serta kohabitasi yang berpotensi adanya kriminalisasi berlebihan karena bukan ranah negara untuk menjadikannya sebagai pidana.

La mengingatkan proses legislasi merupakan proses politik, sehingga harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang diambil, baik secara musyawarah maupun suara terbanyak. Dia menekankan Fraksi NasDem tetap menghendaki RKUHP menyerap masukan yang sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan.

"Karena itu Fraksi NasDem terus melakukan lobi dan meyakinkan fraksi lainnya dan tim pemerintah agar dapat menyempurnakan RKUHP," katanya. ● mei

## Prabowo Temui Menhan Tiongkok, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu Menteri Pertahanan Tiongkok, Jenderal Wei Feng He, Jumat (18/11), waktu setempat.

Pertemuan yang digelar di Xi'an City, Tiongkok tu dalam rangka kunjungan kerja Prabowo.

"Dalam pertemuan ini kedua menteri membicarakan mengenai penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dan isu terkini dunia," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi wartawan, Minggu (20/11).

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengapresiasi Menhan Wei atas sambutan hangat yang diberikan kepadanya. Prabowo juga mengapresiasi Wei atas peran aktifnya dalam menyukseskan hubungan bilateral, khususnya di bidang pertahanan kedua negara.

"Dengan upaya kolaboratif dari kedua belah pihak, kami telah memulai perjalanan pertumbuhan yang cepat. Pak Prabowo ingin berterima kasih kepada Tiongkok, atas dukungan berkelanjutan yang telah diberikan kepada Indonesia selama ini," jelas Dahnil.

Dahnil kemudian menjelaskan apa saja isi pembicaraan Prabowo dan Wei. Pertama, Prabowo menjelaskan bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antara kedua negara

tumbuh cukup dinamis selama ini.

"Misalnya dalam bentuk pertemuan Menteri Pertahanan, latihan angkatan laut bersama, program untuk perwira militer dan think tank, serta kerja sama praktis dalam memerangi kejahatan transnasional dan pencegahan bencana," ujar Dahnil.

Kedua, Prabowo berharap agar kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di bidang pertahanan semakin kuat dan berkembang. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama pendidikan dan latihan militer bersama yang dihentikan sementara sejak pandemi Covid-19 terjadi.

Sementara itu, Wei menekankan bahwa situasi saat ini di kawasan Asia-Pasifik menghadapi tantangan yang berat dan kompleks.

"Oleh karenanya, ia berharap Tiongkok dan Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan," beber Dahnil. Militer kedua negara diharapkan senantiasa menjaga komunikasi strategis yang erat. Selain itu, militer kedua negara juga diharapkan memanfaatkan dengan baik mekanisme kerja sama, memperdalam kerja sama pragmatis dan memperkuat koordinasi multilateral, serta menjaga momentum pembangunan yang baik. ● han



## UNJUK RASA BLOKIR JALAN AREMANIA

Sejumlah supporter Arema FC (Aremania) membawa poster saat berunjukrasa memblokir jalan selama dua jam di jalan Danau Toba, Malang, Jawa Timur, Minggu (20/11). Unjuk rasa blokir jalan yang juga dilakukan di sejumlah titik di kota Malang tersebut dilakukan untuk memprotes aparat penegak hukum yang dinilai lamban dalam pengusutan kasus Tragedi Kanjuruhan.

## Haedar Nashir Terpilih Lagi Jadi Ketum Muhammadiyah

JAWA TENGAH (IM) - Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

"Diserahkan kepada pimpinan baru yang kami sebutkan tadi Prof Haedar dan Prof Abdul Mu'ti," kata panitia Mukhtar PP Muhammadiyah A Dahlan Rais dalam siaran YouTube tvMU Channel, Minggu (20/11).

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dijabat oleh Abdul Mu'ti. Acara kemudian dilanjutkan serah terima jabatan dari pengurus PP Muhammadiyah periode 2017-2022 ke pimpinan periode 2022-2027. Sebelumnya diketahui, Sidang Mukhtar Muhammadiyah ke-48 sudah melewati pemilihan 13 formatur

PP Muhammadiyah. Setelah dilakukan e-voting dan penghitungan suara, ada 13 formatur PP Muhammadiyah yang terpilih.

Dalam siaran langsung kanal YouTube tvMu, Minggu (20/11/2022), posisi pertama ditempati Haedar Nashir dengan 2.203 suara, sedangkan posisi kedua adalah Abdul Mu'ti 2.159 suara.

Berikut daftar 13 formatur PP Muhammadiyah: Haedar Nashir 2.203, Abdul Mu'ti 2.159, Anwar Abbas 1.820, M Busyro Muqoddas 1.778, Hilman Latif 1.675, Mubadjir Effendy 1.598, Syamsul Anwar 1.494, Agung Danarto 1.489, M Saad Ibrahim 1.333, Syafiq A Mughni 1.152, Dadang Kahmad 1.119, Ahmad Dahlan Rais 1.080, dan Irwan Akib 1.001. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## KPU Putuskan Lima Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Ini Alasannya

Lima partai politik yang menang sengketa di Bawaslu RI, ternyata kembali dinyatakan tak memenuhi syarat verifikasi administrasi oleh KPU.

JAKARTA (IM) - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik ungkap sejumlah dasar mengapa lima partai politik (parpol) tidak lolos verifikasi administrasi.

"Partai politik wajib mengikuti verifikasi. Perilaku kami dalam melakukan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 ada perlakuan berbeda," ujar Idham Holik, Minggu (20/11) ketika dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bagi parpol

parlemen yang melampaui angka 4 persen pada pemilu sebelumnya hanya memerlukan verifikasi administrasi. Sedangkan untuk parpol non parlemen dan baru harus mengikuti dua tahapan ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Jika verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat maka parpol tersebut tidak lanjut ke tahap selanjutnya yakni verifikasi faktual," ucapnya.

Idham Holik menyebut

berdasarkan regulasi yang berlaku lima parpol tidak lolos verifikasi administrasi. Lima parpol tersebut menggugat di Bawaslu RI.

"Kelima parpol tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 173 ayat 2 dan Pasal 177 UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU No. 4 Tahun 2022," tutur Idham Holik.

"Sehingga proses pendaftaran parpol khususnya lima parpol tersebut sudah selesai pada saat kami menyampaikan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan Bawaslu RI," kata Idham Holik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari

sebelumnya mengatakan, parpol yang menang dalam gugatan Bawaslu RI beberapa waktu lalu, ternyata setelah dilakukan pengecekan ulang tidak memenuhi syarat administrasi.

Hal tersebut berdasarkan dokumen Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Pemilu Calon Peserta Pemilu 2024 Pascaputusan Bawaslu pada 18 November 2022 lalu yang ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Tertulis dalam dokumen tersebut hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik (PKP) - status tidak memenuhi syarat

## HASIL SURVEI PILPRES 2024 VOXPOL CENTER

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kiri), politisi PKS Muhammad Kholid (kedua kiri), politisi Partai Nasdem Jakfar Sidik (kedua kanan), dan moderator Aprillia Putri (kanan) menyimak pemaparan Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting Pangsi Syarwi Chaniago terkait hasil survei nasional bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres Cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Jumat (18/11).

## Anggota DPR Puji Profesionalitas TNI-Polri Saat Pengamanan KTT G20 di Bali

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono memuji kinerja TNI saat melakukan pengamanan selama gelaran KTT G20 di Bali. Sugiono menilai keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presidensi KTT G20 tak terlepas dari faktor pengamanan yang baik.

"Pelaksanaan KTT G20 merupakan sebuah perhelatan yang sukses. Presiden Joko Widodo berhasil menunjukkan wibawa Indonesia di mata negara-negara peserta G20. Keberhasilan ini juga ditentukan salah satunya oleh faktor pengamanan yang sigap, teliti dan terkoordinir dengan baik," kata Sugiono kepada wartawan, Minggu (20/11).

Sugiono pun menyoroti kerja-kerja pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri dari tingkat wilayah hingga venue acara. Termasuk mengamankan kepala negara yang hadir di forum internasional itu.

"TNI dan Polri telah menunjukkan performa yang profesional dalam mendukung terlaksananya KTT ini dengan baik dan lancar di bidang pengamanan wilayah,

venue acara, dan pengamanan individu kepala-kepala negara yang hadir," katanya.

Lebih lanjut, Sugiono mengatakan TNI dan Polri mampu menunjukkan profesionalitas selama acara tersebut. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di Bali mampu menunjukkan wibawa RI di mata dunia semakin meningkat.

"TNI dan Polri mampu menunjukkan profesionalitasnya dengan menyediakan pengamanan yang baik sehingga penyelenggaraan KTT dapat berjalan dengan lancar, serta wibawa Indonesia di mata dunia semakin meningkat. Diketahui, penyelenggaraan KTT G20 dilakukan dengan pengamanan yang tak biasa. Salah satunya melibatkan Pasukan Cordon.

Para tamu negara yang hadir mendapat penghormatan militer oleh Pasukan Kehormatan atau Pasukan Cordon dari Yonwalprotneq Paspampres.

Dalam keterangan tertulis Penerangan Puspomad, Minggu (20/11), berbagai latihan dan geladi telah dilaksanakan

dengan serius demi keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai pasukan kehormatan atau pasukan Cordon untuk menyambut tamu negara yang datang ke Indonesia dalam rangka KTT Presidensi G20 tahun 2022 maupun saat kepulangan para delegasi.

Pasukan Cordon sendiri diisi prajurit-prajurit militer TNI AD terbaik. Mereka bertugas sebagai pengawal protokol kenegaraan. Pasukan inilah yang menyambut Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden hingga Presiden Tiongkok Xi Jinping.

"Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Polisi Militer TNI AD karena personel pasukan kehormatan atau pasukan Cordon Paspampres sejatinya adalah prajurit-prajurit Polisi Militer TNI AD terbaik yang bertugas di Batalyon Pengawal Protokol Kenegaraan (Yonwalprotneq) Paspampres," kata Kapen Puspomad Letkol Cpm Agus Subur dalam keterangan tertulis.

Berbagai tugas protokol kenegaraan menjadi tugas utama Yonwalprotneq Paspampres, termasuk kunjungan kehormatan pimpinan negara-negara sahabat. ● mei

## Sidang Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Brigadir J Kembali Digelar Hari Ini

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) setelah ditunda selama sepekan, rencananya hari ini, Senin (21/11), sidang pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat alias Brigadir J kembali digelar.

"Senin (21/11) sidang Richard Eliezer, Kwat Ma'ruf, Ricky Rizal, agenda pemeriksaan saksi," kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyanto, Minggu (20/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam sidang pada Senin besok akan diadagkan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Bripta Ricky Rizal dan Kwat Ma'ruf.

Sementara itu untuk sidang Ferdly Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Kwat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo.

Sementara dalam sidang kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan perkara pembunuhan Brigadir J terdapat 7 terdakwa, yakni Ferdly Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatricia, Irfan Widyanto, Arif Rahman, Baiquni, dan Chuck Putranto. ● han



## IMBAUAN PERKETAT PROTOKOL KESEHATAN

Sejumlah warga memadati Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/11). Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa peningkatan kasus konfrimasi COVID-19 disebabkan oleh munculnya subvarian baru dan menghimbau masyarakat untuk memperketat protokol kesehatannya serta vaksin booster.

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7**

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7").

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian") telah sepakat untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 tertanggal 18 November 2022, yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi telah melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyerahan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 yang telah diterbitkan, yang dilakukan atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyerahan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7, serta telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran atas Pelunasan Lebih Awal kepada seluruh Pemegang Unit Penyerahan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 dan Bank Kustodian telah melakukan pembayaran sesuai instruksi tersebut di atas, sehingga pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyerahan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7.
- Pada tanggal 21 November 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 sejak tanggal 21 November 2022.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 7 di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

**SYAILENDRA** Jakarta, 21 November 2022

Manajer Investasi  
PT Syailendra Capital  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**reksa dana**